

**PENGUATAN TRADISI DAN SIMBOL ELIT ARISTOKRAT
DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL
DI KABUPATEN SOPPENG**



Oleh:

Muhaemin, S.Sy.

NIM: 1420310062

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhaemin, S.Sy.
NIM : 1420310062
Jenjang : Magister (2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,



Muhaemin, S.Sy.
NIM: 1420310062

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhaemin, S.Sy.
NIM : 1420310062
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,



Muhaemin, S.Sy.
NIM: 1420310062

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PENGUATAN TRADISI DAN SIMBOL ELIT ARISTOKRAT
DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL DI KABUPATEN
SOPPENG

Nama : Muhaemin, S.Sy.

NIM : 1420310062

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Tanggal Ujian : 17 NOVEMBER 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sosial
(M.Sos.).

Yogyakarta, 17 November 2016.

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : PENGUATAN TRADISI DAN SIMBOL ELIT ARISTOKRAT
DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL DI KABUPATEN
SOPPENG

Nama : Muhaemin, S.Sy.

NIM : 1420310062

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : HI/SPPI

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji : Zulkipli Lessy, M.A., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

Penguji : Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 November 2016

Waktu : 11.00 WIB

Hasil/Nilai : 94,6/ A/ 3.75

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

()
()
()

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PENGUATAN TRADISI DAN SIMBOL ELIT ARISTOKRAT DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL DI KABUPATEN SOPPENG

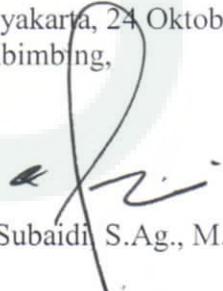
Yang ditulis oleh:

Nama	: Muhaemin, S.Sy.
NIM	: 1420310062
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016
Pembimbing,


Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

Abstrak

Dinamika politik di tingkat lokal selalu menarik perhatian untuk dikaji, terutama daerah-daerah bekas kerajaan seperti Soppeng, Sulawesi Selatan. Hal ini karena kaum elit lama Soppeng, dalam hal ini aristokrat, berusaha mengembalikan kekuasaan mereka yang pernah dipenggal oleh rezim Orde Baru, dengan berusaha melakukan pelestarian terhadap tradisi-tradisi dan simbol-simbol aristokrasi mereka untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk menguatkan kekuasaan politik di era demokratisasi ini. Maka dari itu, problematika yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah; bagaimana proses politik yang terjadi dalam dinamika politik lokal di Kabupaten Soppeng sebagai bentuk pelestarian tradisi dan simbol aristokrasi?; kemudian, bagaimana tradisi dan simbol aristokrasi sebagai bentuk pertarungan antara aristokrat dengan non aristokrat?; dan bagaimana pola pelestarian tradisi dan simbol aristokrasi sebagai penguatan terhadap kekuasaan aristokrat?.

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori interaksionisme simbolik sebagai alat bedah dengan pendekatan historis sosiologis. Adapun metode yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Yaitu, suatu metode yang mengharuskan seorang peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan memahami segala macam peristiwa yang terjadi pada objek penelitian, dalam hal ini peristiwa politik yang terjadi di Kabupaten Soppeng.

Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa; *pertama*, besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah di era Reformasi menyebabkan kaum elit aristokrat Soppeng berupaya mengendalikan segala proses politik yang terjadi di Kabupaten Soppeng melalui legitimasi mitos To Manurung dengan memunculkan tradisi dan simbol aristokrasi. *Kedua*, seiring semakin berkembangnya kondisi sosial kemasyarakatan di Soppeng, pola pikir masyarakat Soppeng juga mengalami perkembangan. Dalam menyikapi pertarungan tradisi dan simbol aristokrasi dengan tradisi dan simbol non aristokrasi dalam kontestasi politik yang terjadi, masyarakat dalam berinteraksi politis terbagi atas dua golongan, yaitu golongan tradisionalis dan golongan rasionalis. Golongan tradisionalis ini merupakan golongan masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai leluhur mereka yang sarat dengan mitos, seperti jabatan kepemimpinan sebagai hak prerogatif aristokrat, sehingga segala urusan politik mereka serahkan sepenuhnya kepada kaum aristokrat. Adapun golongan rasionalis merupakan golongan masyarakat yang telah menempuh pendidikan minimal strata satu, dan juga golongan masyarakat yang sering mengadakan diskusi-diskusi non formal, sehingga mereka lebih kritis dalam menentukan sikap politis mereka. *Ketiga*, pola pelestarian tradisi dan simbol aristokrasi sebagai alat penguatan terhadap kekuasaan politik yang diterapkan oleh kaum aristokrat Soppeng dilakukan dengan cara, seperti; memunculkan tradisi dan simbol aristokrasi dalam birokrasi pemerintahan; mengadakan seminar dan festival kebudayaan; melakukan penerbitan buku-buku terkait sejarah aristokrasi Soppeng; dan lain sebagainya.

KATA PENGANTAR



Segalah puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis ini dengan baik. Begitupula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin dan suri tauladan kita yaitu Rasulullah, Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan M.A, M Phil, Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D dan Bapak Ahmad Rafiq, M.Ag., Ph.D Selaku Ketua dan Sekretaris Progran Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) Program Pascasarjana UIN Suna Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si., Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran sampai tesis ini bisa terselesaikan.

5. Segenap Dosen Prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam yang telah memberikan ilmu yang semoga bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
6. Bapak, Ibu dan keluarga tercinta di kampung atas doa yang selalu dipanjatkan serta perhatian, kasih sayang dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini, hasil karya ananda yang sederhana ini dipersembahkan untuk Bapak, Ibu, dan keluarga tercinta.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, atas izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Soppeng.
8. Bapak Kepala Desa Mariorilau, Andi Mappatunru dan Ibu Desa, Elya Ros A.Md serta Pung Subaedah yang sudi menemani penulis menemui beberapa tokoh budayawan Soppeng.
9. Segenap warga Soppeng yang bersedia penulis wawancarai, terkhusus A. Rudianto A.M.d, selaku tokoh pemuda; Bapak Agus Salim, mantan Kepala Dusun Lausa; Bapak Sarika dan Andi Ridha Mangkona B.Ac, Selaku Budayawan Soppeng; Bapak Andi Haruna sekeluarga dan Bapak Sarifuddin sekeluarga selaku tokoh masyarakat, serta semua warga Soppeng yang tidak bisa dan atau tidak ingin disebutkan namanya.
10. Para pembina Pondok Pesantren YASRIB (Yayasan Perguruan Islam Beowe) Soppeng, H. Muh. Taslim Basri Daud, Lc., selaku Pimpinan dan pembina, KM. Arham Basri Daud S.pd.I., KM. Basri S.Pd.I., Muhammad Juna, selaku guru dan pembina. Terkhusus kepada KM. Husaini S.Pd.I selaku Kepala Sekolah Madrasah

Tsanawiyah Yasrib Soppeng, atas kemurahan hatinya mengizinkan penulis untuk menginap beberapa hari dikediamannya selama penulis melakukan penelitian. Terima kasih, kalian mengajarku arti sebuah pengabdian.

11. Semua staf perpustakaan wilayah Sulawesi Selatan, staf Perpustakaan Daerah Kabupaten Soppeng dan staf Perpustakaan Daerah Kabupaten Barru. Terima kasih Bapak, Ibu, Kakanda atas bantuannya mencarikan penulis referensi.
12. Teman-teman seperjuangan dari tanah Sulawesi Selatan: Basri, Kak Rahmat, Fikri Hamdani, Kak Suherman, Abdul Gaffar, Muttaqim. Terima kasih atas doa dan *support*-nya.
13. Teman-teman seperjuangan di SPPI regular angkatan 2014/2015 yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini. Kebersamaan kita selama ini adalah pengalaman yang akan selalu menjadi kenangan indah dalam hidup penulis, kalian semua luar biasa.
14. Seluruh sahabat, pemilik dan kawan-kawan kos, staf Prodi dan PPS, serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.

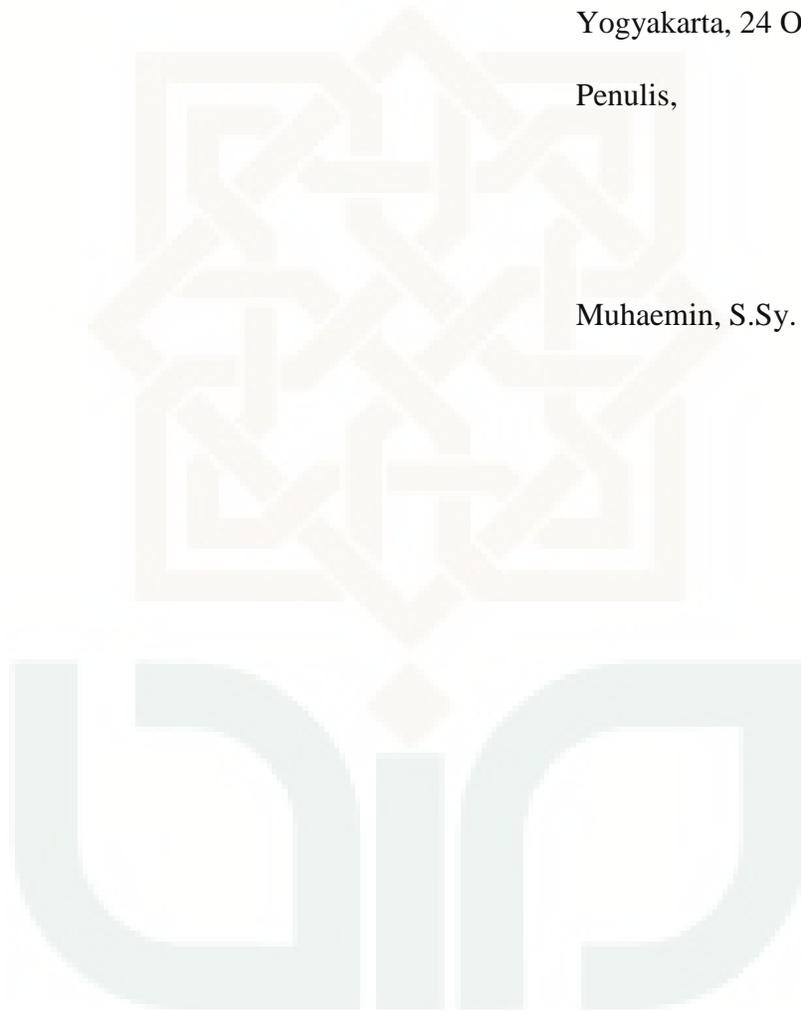
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam Tesis ini, dan segala kritik dan tegur sapa menjadi beban tanggung jawab penulis. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan serta kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tesis ini dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Penulis,

Muhaemin, S.Sy.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	v
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teoritis	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : PROSES POLITIK DAN PELESTARIAN TRADISI DAN SIMBOL ARISTOKRASI DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL DI KABUPATEN SOPPENG	22
A. Proses Politik Soppeng dari Waktu ke Waktu	22
1. Era Pra Kolonial	22
2. Era Kolonial	51
3. Era Pasca Kolonial	53
4. Era Reformasi	55
B. Pelestarian Tradisi dan Simbol Aristokrasi dalam Dinamika Politik Soppeng	56
1. Tradisi-tradisi Aristokrasi	56
2. Simbol-simbol Aristokrasi	67
BAB III : PERTARUNGAN TRADISI DAN SIMBOL ARISTOKRASI VS TRADISI DAN SIMBOL NON ARISTOKRASI DALAM KONTESTASI POLITIK DI KABUPATEN SOPPENG	75
A. Munculnya Tradisi dan Simbol Non Aristokrasi di Atas Panggung Perpolitikan Soppeng	75
1. Tradisi-tradisi Non Aristokrasi	76
a. Tradisi Money Politics	76

b. Tradisi Ngopi Bareng	82
2. Simbol-simbol Non Aristokrasi	83
a. Agama	84
b. <i>Amaccangeng</i>	87
c. <i>Asagenangeng</i>	89
d. Masyarakat	91
B. Pengaruh Pelestarian Tradisi dan Simbol Aristokrasi dan Pemunculan Tradisi dan Simbol Non Aristokrasi Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Soopeng	91
1. Masyarakat Tradisionalis	92
2. Masyarakat Rasionalis	95
BAB IV : POLA PELESTARIAN TRADISI DAN SIMBOL ARISTOKRASI YANG DILAKUKAN OLEH ARISTOKRAT SOPPENG	100
A. Pola Pelestarian Tradisi dan Simbol Aristokrasi yang Berlaku di Lingkungan Aristokrat	100
B. Pola Pelestarian Tradisi dan Simbol Aristokrasi yang Berlaku di Lingkungan Masyarakat	104
1. Secara Formal	104
2. Secara Informal	113
BAB V : PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	134

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi, 125
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian, 132
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian, 133



DAFTAR ISTILAH

To Manurung	: Manusia yang diyakini turun dari langit
Pangngadereng	: Merupakan Konsep Adat Masyarakat Bugis Tradisional yang berisi tentang ade', rapang, wari, bicara, dan sara'.
Matoa	: Kepala Kampung
Petta manurungngge	: Istilah Lain yang digunakan Untuk menyebut To Manurung
Arung Bila	: Gelar Bagi Kepala Pemerintahan Bugis Tradisional (DPRD
Datu	: Raja
Ade'	: Adat
Rapang	: Yurisprudensi
Bicara	: Aturan Hukum
Wari	: Aturan Prihal Status Sosial
Sara'	: Agama
Pappaseng	: Petuah
Anakarung	: Aristokrat
Tau sama	: Masyarakat Biasa
Siri'	: Malu
Tane'	: Berat Hati
Mabusung	: Kualat
Mattoriolo	: Tradisi Masa Lalu yang dilaksanakan di Zaman Sekarang
Sanro	: Dukun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjuangan menuju negara demokratis pasca Reformasi yang menelorkan desentralisasi politik telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam dinamika politik lokal. Bukan hanya dalam masalah relasi antara pusat dengan daerah atau relasi kekuasaan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif di daerah,¹ namun juga dalam hal pemilihan kepala daerah yang kini dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui proses pemilu yang lebih demokratis.² Implikasi perubahan sistem pemerintahan inipun mendorong para elit lokal, terutama kaum elit aristokrat, untuk lebih “kreatif” dalam berpolitik.

Keberadaan dan peran elit aristokrat dalam dinamika politik lokal menarik untuk selalu dicermati, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana mereka berusaha mendapatkan kembali jabatan politis mereka. Hal ini karena, meski telah terbuka ruang yang lebih luas bagi elit politik lokal untuk mengekspresikan keberadaan dan perannya yang sebelumnya terkungkung dominasi pemerintah atas nama negara, namun yang terjadi – dengan melemahnya peran negara tersebut yang diikuti dengan berkembangnya situasi kondusif bagi

¹ Lihat Ignatius Ismanto, “Dinamika Politik Lokal di Era Otonomi Daerah”, dalam *Proceeding Nasional Otonomi Daerah 2011*, LAB-ANE FISIP Untirta, 1.

² Di Era Orba, meskipun dewan-dewan yang ada di Provinsi dan di Kabupaten berhak menunjuk kandidat Gubernur atau Bupati, namun secara aktual yang punya kewenangan untuk menunjuk adalah Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Demikian pula dalam masalah pertanggungjawaban kepala daerah, bukan merupakan wewenang DPRD, sehingga tidak mengherankan jika para eksekutif di Daerah, baik di Daerah Tingkat I maupun Tingkat II hanya merupakan *agent of sentral government*. Lihat Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, “Pendahuluan” dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.), *Politik Lokal di Indonesia*, terj. Bernard Hidayat, (Jakarta: KITLV, 2007), 15.

demokratisasi – elit aristokrat harus bekerja ekstra dan berupaya maksimal secara mandiri untuk dapat berkuasa kembali. Jika pada saat Orde Baru keberadaan dan peran elit aristokrat di daerah lebih banyak disetir oleh negara, maka dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004, mereka harus mampu menciptakan “strategi jitu” untuk bisa meraih dan mempertahankan posisi serta perannya. Begitupula, kondisi perpolitikan semacam ini, disatu sisi, akan berakibat pada kontestasi politik yang akan semakin ketat, dimana kemungkinan dinamika dalam kontestasi politik akan berlangsung tidak hanya dikalangan internal elit aristokrat itu sendiri, namun juga dari kalangan eksternal (non-aristokrat). Dan disisi lain, kemungkinan massa tidak akan lagi menjadi sebagai objek yang pasif terhadap hubungannya dengan elit.

Kondisi politik tersebut nampaknya yang membuat kaum elit aristokrat berusaha melakukan penguatan terhadap tradisi-tradisi dan simbol-simbol aristokrasi mereka. Menariknya, upaya untuk berkuasa kembali yang dilakukan elit aristokrat tersebut, bukan hanya berpedoman kepada legitimasi mitos To Manurung, namun juga berusaha mendapatkan legitimasi dari agama, dalam hal ini agama Islam sebagai agama komunal yang dianut oleh elit aristokrat serta masyarakat setempat.

Maka dari itu, dengan adanya para elit aristokrat melakukan penguatan terhadap tradisi dan simbol-simbol aristokrasi yang pernah dipraktekkan dan digunakan oleh para pendahulu mereka saat berkuasa, maka *mainset* masyarakat, utamanya yang awam, akan ter-*update*; kepercayaan masyarakat terhadap mitos

para pendahulunya akan menguat; dan pada akhirnya kepercayaan tersebut akan ikut berkontribusi dalam menentukan sikap politik masyarakat.

Salah satu daerah yang elitnya berusaha melakukan penguatan terhadap tradisi-tradisi dan simbol-simbol aristokrasi adalah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu daerah bekas kerajaan yang berdiri pada tanggal 23 Maret 1261, sangat memungkinkan elit aristokratnya menjadikan tradisi-tradisi dan simbol-simbol aristokrasi sebagai alat politik. Hal ini karena disatu sisi, sejarah lahirnya Kabupaten Soppeng dihiasi dengan cerita-cerita mitos, dan disisi lain, Soppeng terbilang Kabupaten yang terletak jauh dari ibu kota provinsi, yaitu berkisar 180 km. Dan pula, dengan area yang cukup luas, Kabupaten ini memiliki wilayah-wilayah yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten, sehingga pengaruh dunia modern masih sangat terbatas. Akibatnya, sebagian besar masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang pernah dipraktekkan oleh para pendahulunya. Ini terbukti dari cara mereka merespon mitos tentang asal-usul stratifikasi sosial mereka yang termanifestasi pada cara mereka berperilaku, baik itu dalam hal sosial, ekonomi, budaya, maupun dalam hal politik.

Oleh karena itu, substansi penelitian ini akan mengungkap bagaimana proses politik yang terjadi dalam dinamika politik lokal dari waktu ke waktu di Kabupaten Soppeng yang membuat kaum elit aristokrat melakukan penguatan terhadap tradisi dan simbol-simbol aristokrasi mereka sebagai alat politik, serta bagaimana tradisi dan simbol-simbol aristokrasi itu turut berkontribusi dalam peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di Kabupaten Soppeng, sehingga menjadi penguat terhadap kekuasaan aristokrat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk lebih terarahnya pembahasan dalam tulisan ini, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses politik yang terjadi dalam dinamika politik lokal di Kabupaten Soppeng sebagai bentuk pelestarian tradisi dan simbol aristokrasi?
2. Bagaimana tradisi dan simbol aristokrasi tersebut sebagai bentuk pertarungan antara aristokrat dengan non aristokrat Soppeng dalam kontestasi politik di Kabupaten Soppeng?
3. Bagaimana pola pelestarian tradisi dan simbol aristokrasi tersebut sebagai penguatan terhadap kekuasaan aristokrat Soppeng?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui proses politik yang terjadi di Kabupaten Soppeng yang menyebabkan terjadinya pelestarian tradisi dan simbol aristokrasi oleh kaum aristokrat Soppeng
2. Ingin mengetahui dampak pelestarian tradisi dan simbol aristokrasi sebagai bentuk pertarungan antara aristokrat dengan non aristokrat Soppeng
3. Serta ingin mengungkap seperti apa pola pelestarian tradisi dan simbol yang dilakukan oleh kaum aristokrat Soppeng sebagai penguatan terhadap kekuasaan mereka.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Penelitian ini kiranya dapat memberi informasi terkait dinamika politik di daerah-daerah bekas kerajaan, terutama pasca lahirnya Undang-undang Pemerintahan Daerah, seperti Kabupaten Soppeng. Hal ini karena, kaum elit aristokrat di Kabupaten tersebut berusaha melakukan penguatan terhadap kekuasaan politik mereka sebagaimana pada masa lalu dengan melestarikan tradisi dan simbol aristokrasi sebagai alat politik.
2. Dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik sebagai alat bedah, hasil penelitian ini dapat memberi informasi yang berbeda terkait kajian dinamika politik lokal di daerah, dimana kajian-kajian sebelumnya kebanyakan menggunakan teori-teori seperti teori gerakan sosial, teori behaviouralistik, teori struktural-fungsional, dan lain sebagainya.
3. Untuk menambah pustaka sekaligus dapat memberi kontribusi pemikiran dan memperluas wawasan tentang perilaku politik aristokrat, khususnya aristokrat yang ada di Kabupaten Soppeng.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang penguatan tradisi dan simbol aristokrasi dalam dinamika politik lokal, sejauh pengamatan penulis belum ada yang mengkajinya secara mendalam. Haryanto, salah satu staf pengajar pada jurusan Politik dan Pemerintahan FISIFOL UGM, dalam Jurnal "*Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*", Volume 13, Nomor 2, November 2009, tentang "Elit Politik Lokal Dalam Perubahan Sistem Politik",³

³ Haryanto, "Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 13, Nomor 2, November 2009, 131-148.

misalnya. Dalam tulisan tersebut, Haryanto meminjam teori strukturasi dari Antoni Giddens sebagai pisau analisisnya, sehingga fokusnya hanya pada bagaimana struktur dan aktor itu saling mempengaruhi, atau dalam istilah Giddens dualisme hubungan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa seorang *actor* dalam hal ini elit politik lokal, disatu waktu dia dapat mengalami pembatasan oleh struktur yang ada, namun diwaktu yang sama dapat pula mengalami pemberdayaan dari struktur yang ada. Hal ini karena seorang *actor* akan selalu berupaya menyasati struktur yang ada demi melepaskan diri dari pengekan struktur tersebut. Dan dalam rangka menyasati struktur tersebut, seorang *actor* harus melakukan upaya, yang oleh Giddens disebut de-rutanasi.

Kemudian Andi Faisal Bhakti, dalam buku yang disunting oleh Nordolt dan Klinken (2007) telah melakukan penelitian di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Wajo, tentang politik bangsawan, terutama pasca lahirnya undang-undang otonomi daerah, dengan judul penelitian “Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan”.⁴ Pendekatan yang digunakan oleh Bhakti dalam penelitian tersebut adalah Patron-klien. Karena objek penelitiannya hanya terbatas pada lingkungan keluarga para bangsawan, sehingga hasil dari penelitian tersebut membuktikan: *Pertama*, betapa masih mengentalnya politik kekeluargaan aristokrat yang berlangsung di Kabupaten tersebut akibat jaringan patron-klien yang masih sangat kuat. *Kedua*, desentralisasi dan otonomi daerah bukannya membuka ruang yang lebih luas kepada semua pihak untuk berpartisipasi di ruang

⁴ Lihat Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, 491-504.

publik; membangun tata pemerintahan yang baik (*good government*), transparansi dan demokrasi, tapi justru memperkuat pemerintahan otokrasi.

Selanjutnya, penelitian yang menyinggung masalah pengaruh simbol dalam dinamika politik lokal, yaitu, yang dilakukan oleh Imam Mujahidin Fahmid dkk. dalam jurnal "*Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*" dengan judul penelitian "Pasang Surut Polarisasi Elit di Dalam Etnis Bugis dan Makassar".⁵ Dalam tulisan tersebut, Fahmid dkk. lebih melihat pada pertarungan dua etnis besar yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu etnis Bugis dan etnis Makassar, dimana kedua etnis tersebut saling bersaing dalam memperebutkan jabatan nomor 1 ditingkat provinsi, yaitu Gubernur. Tulisan tersebut dimulai dari konsep pembentukan elit kekuasaan dari kedua etnis, proses lahirnya elit-elit baru dari kedua etnis, hingga sampai pada pertarungan antara kedua etnis dalam kontestasi politik.

Penelitian tentang politik etnisitas di Sulawesi Selatan juga dilakukan oleh Sugiprawaty (2009), mahasiswa program Magister Ilmu Politik di Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul penelitian (tesis) "Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan: Studi Pilkada di Sulawesi Selatan TH 2007-2008". Dalam tulisan tersebut, Sugiprawaty juga mengemukakan pertarungan politik antar dua etnis besar yang ada di Sulawesi Selatan dengan menggunakan teori Korporatisme yang dipelopori oleh Philippe C. Schmitter sebagai pisau analisis dalam melihat pecahnya korporatisme kekuatan lama, yang mana di masa Orde Baru berusaha untuk melakukan penekanan dan penutupan

⁵ Imam Mujahidin Fahmid dkk., "Pasang Surut Polarisasi Elit di Dalam Etnis Bugis dan Makassar", dalam Jurnal *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Agustus 2012, 179-188.

akses politik, namun kemudian munculnya kekuatan-kekuatan baru yang memecahkan dominasi kekuatan-kekuatan yang lama sehingga kekuatan-kekuatan lama tidak mampu lagi melakukan penetrasi.⁶ Kemudian dalam hal pergantian elit, Sugiprawaty menggunakan teori pergantian elit yang dipelopori oleh Pareto.⁷ Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan primordialisme dan instrumentalisme,⁸ Sehingga dari kedua teori dan pendekatan tersebut, nampak bahwa, pergantian elit politik berkuasa dari etnis tertentu di Sulawesi Selatan itu lebih disebabkan oleh hubungan setiap elit dari etnis tertentu dengan pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, dari pemaparan di atas, baik objek penelitian maupun metodologi yang akan penulis gunakan dalam tesis ini, akan sangat berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Apa yang telah diteliti oleh Haryanto, hasilnya akan berbeda dengan hasil yang akan diperoleh oleh penulis ini. Hal ini karena, meski tulisan tersebut fokusnya elit politik lokal, yang artinya sama dengan objek materil dalam tulisan ini, namun disatu sisi, fokus kajiannya terhadap elit politik lokal terlalu luas sehingga hasil yang dicapai pun juga masih sangat bersifat umum. Dan disisi lain, landasan teori yang digunakannya pun berbeda dengan yang penulis gunakan.

Kemudian Bhakti, hasil penelitiannya juga akan sangat berbeda dengan penelitian penulis. Karena, baik dari segi tempat, maupun dari segi objek formil yang akan penulis gunakan juga berbeda dengan apa yang telah digunakan oleh

⁶ Sugiprawaty, "Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan TH 2007-2008, 36.

⁷ *Ibid.*, 38.

⁸ *Ibid.*, 32

Bhakti. Begitupula dengan Fahmid dkk. Meski dalam penelitiannya mereka menyinggung masalah simbol kebangsawanan yang digunakan oleh para elit lokal sebagai alat politik, sebagaimana fokus dalam tulisan ini, namun Fahmid dkk, hanya membahasnya secara sepintas lalu. Sehingga bagaimana efek yang ditimbulkan oleh simbol tersebut dalam kontestasi politik lokal, belum berhasil diungkap. Dan demikian halnya dengan Sugiprawaty, meskipun dia mengungkap latar belakang munculnya elit Sulawesi Selatan, stratifikasi masyarakat, dan bahkan mampu memetakan penyebab setiap etnis mampu berkuasa di Sulawesi Selatan, namun dia hanya menjadikannya sebagai bahan pelengkap kajian, sehingga dia pun luput mengkaji seberapa besar pengaruh historisitas itu dalam kontestasi politik antar etnis di Sulawesi Selatan.

E. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisa penguatan tradisi dan simbol elit aristokrat di Kabupaten Soppeng dalam dinamika politik lokal, penulis meminjam teori interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik merupakan salah satu teori sosiologi yang dipelopori oleh George Herbert Mead, Charles Horton Cooley, W.I. Thomas, Herbert Blumer dan Erving Goffman, lalu kemudian dikembangkan oleh beberapa ilmuwan seperti, diantaranya adalah, Manis, Meltzer, A. Rose dan Snow. Menurut para pengembang teori tersebut, untuk memahami teori interaksionisme simbolik ini, perlu diketahui prinsip-prinsip dasarnya,⁹ bahwa manusia memiliki beberapa

⁹ George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Edisi kedelapan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 625-632

kelebihan yang mampu membimbingnya menentukan pilihan dalam berinteraksi, yaitu:

1. Kemampuan untuk berpikir

Asumsi dasar yang sangat penting dalam teori interaksionisme simbolik adalah, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Bernard Meltzer, James Petras, dan Larry Reynolds, sebagaimana yang dikutip oleh Ritzer, mengatakan bahwa asumsi kemampuan manusia untuk berpikir adalah salah satu sumbangan utama para interaksionis simbolik yang mula-mula seperti James, Dewey, Thomas, Cooley dan juga Mead. Kemampuan berpikir yang dimaksud tersebut adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk bertindak secara reflektif daripada hanya berperilaku secara tidak reflektif. Yang berarti seseorang harus sering menyusun dan memandu apa yang mereka lakukan, bukan tanpa berpikir. Karena bagaimanapun juga pikiran akan menghubungkan seseorang ke hampir segala aspek interaksionisme simbolik lainnya, termasuk sosialisasi, makna-makna, simbol-simbol, diri, interaksi, dan bahkan masyarakat.

Konsep berpikir itu pula menurut Mead, akan sangat dipengaruhi oleh ide-ide mengenai konsep diri, dimana setiap individu memiliki potensi khas untuk menjadi subjek dan objek. Secara dialektis, pikiran dan diri saling berhubungan. Yakni, menurut Mead, disatu sisi tubuh hanya bisa menjadi diri, jika pikiran telah berkembang, dan disisi lain, diri bersama kerefleksifannya, esensial bagi

perkembangan pikiran. Sehingga memisahkan diri dan pikiran akan menjadi suatu hal yang mustahil, karena diri adalah suatu proses mental.¹⁰

Sikap seseorang terhadap dirinya akan terejawantahkan pada bentuk perilaku yang diperaktekkannya. Jika dia mampu memahami dirinya sendiri, maka cara dia berinteraksi akan sesuai dengan proporsinya, demikian pula sebaliknya. Muhammad Budyatna dalam “*Komunikasi Bisnis Silang Budaya*” mengilustrasikan bagaimana pentingnya konsep mengenal diri dalam berkomunikasi melalui sebuah contoh kasus. Misalnya, seorang laki-laki yang ingin mengajak seorang perempuan untuk kencang, maka terlebih dahulu dia akan berpikir (bertanya kepada diri sendirinya), bagaimana supaya tujuannya tercapai. Dalam kondisi berpikir tersebut, si laki-laki akan melibatkan dirinya, dalam hal ini berusaha mengenali dirinya lebih dalam, sehingga muncul keyakinan akan tercapainya tujuan melalui pemilihan cara dan susunan kata-kata yang telah tersaring dalam pikiran.¹¹

2. Berinteraksi

Kemampuan manusia untuk berpikir sebagaimana disebutkan di atas harus dibentuk dan diperbaiki didalam proses interaksi sosial. Berbeda dengan para sosiolog konvensional yang kemungkinan besar melihat sosialisasi (interaksi sosial) hanya sebagai proses yang mengajarkan orang hal-hal yang mereka butuhkan agar dapat bertahan hidup, para interaksionis simbolik justru

¹⁰ *Ibid.*, 614-615.

¹¹ Muhammad Budyatna, *Komunikasi Bisnis Silang Budaya*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), 15.

menganggap interaksi sosial sebagai proses yang lebih dinamis yang memungkinkan orang mengembangkan kemampuan berpikir dan untuk berkembang di dalam cara-cara yang khas manusia.

3. Memahami makna dan simbol-simbol

Memahami makna dan simbol dalam berinteraksi merupakan salah satu prinsip dasar yang penting dalam teori interaksionisme simbolik. Perhatian sentralnya bukan pada bagaimana manusia menciptakan secara mental makna-makna dan simbol, akan tetapi lebih kepada bagaimana manusia mempelajari makna dan simbol itu selama berinteraksi secara umum dan bersosialisasi secara khusus.

Charon, sebagaimana dikutip oleh Gertz menjelaskan bagaimana manusia mempelajari simbol-simbol dan makna-makna didalam berinteraksi tanpa harus berpikir panjang. Karena makna dan simbol-simbol merupakan objek-objek sosial yang digunakan untuk menggambarkan atau menggantikan atau mengambil tempatnya, apapun yang disetujui orang untuk digambarkan.

Secara spesifik, simbol mempunyai sejumlah fungsi bagi seseorang, yaitu: yang *pertama*, simbol-simbol mampu membuat seseorang berhubungan dengan dunia material dan dunia sosial dengan cara memberi nama atau mengkategorikan dan mengingat objek-objek yang pernah mereka jumpai. Yang *kedua*, simbol-simbol juga mampu meningkatkan kemampuan manusia memahami lingkungannya, tanpa harus dibanjiri stimuli-stimuli yang tidak terbedakan. Yang *ketiga*, simbol-simbol meningkatkan kemampuan manusia untuk berpikir. Yang *keempat*, simbol-simbol meningkatkan secara besar-besaran kemampuan manusia

untuk memecahkan segala persoalan yang dihadapi. Yang *kelima*, simbol-simbol memungkinkan seseorang melampaui waktu, ruang, dan bahkan dirinya sendiri, yaitu dengan konsep “mengambil peran orang lain”. Yang *keenam*, simbol-simbol memungkinkan seseorang mampu membayangkan suatu realitas metafisik, seperti langit dan neraka. Dan yang *ketujuh*, simbol-simbol juga memungkinkan seseorang menghindari diperbudak oleh lingkungan, bahkan mampu membuat seseorang menjadi aktif daripada pasif dengan mengarahkan perbuatannya sendiri.

4. Membuat Pilihan

Karena kemampuan manusia untuk memahami makna dan simbol-simbol, sehingga membuat manusia mampu membuat pilihan-pilihan didalam menentukan tindakan. Oleh karena itu, seseorang dalam teori interaksionisme simbolik ini, setidaknya mempunyai otonomi. Manusia tidak mesti harus dibatasi atau ditentukan, karena manusia memiliki kemampuan membuat pilihan-pilihan yang unik dan independen.

5. Bertindak

Karena manusia merupakan makhluk yang mampu menentukan pilihan-pilihan maka hal tersebut berimplikasi pada setiap tindakan yang diambilnya. Dalam persoalan tindakan ini, perlu kita mengetahui perbedaan yang dilakukan oleh Mead tentang perilaku terang-terangan dan perilaku tersembunyi. Perilaku terang-terangan adalah perilaku aktual oleh seorang aktor. Sedangkan perilaku tersembunyi adalah proses berpikir yang melibatkan makna-makna dan simbol-

simbol. Perilaku terang-terangan merupakan kajian para behavioris, sedangkan perilaku tersembunyi merupakan kajian para interaksionis.

Oleh karena itu, didalam proses interaksi sosial, bagi kalangan interaksionis, orang-orang mengkomunikasikan secara simbolis makna-makna kepada orang yang terlibat dalam interaksi tersebut. Dengan kata lain, setiap aktor yang terlibat dalam suatu interaksi sosial akan saling mempengaruhi. Berikut penulis cantumkan bagan dari teori interaksionis simbolik.



Dari kerangka teori di atas, penulis akan menggunakannya untuk mengkaji pengaruh tradisi dan simbol dalam proses interaksi masyarakat (terutama dalam hal interaksi-politis) yang ada di Kabupaten Soppeng. Aktor yang dimaksud dalam tulisan ini adalah, setiap individu dari masyarakat Soppeng, dimana dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa asumsi teori ini mengatakan, setiap

orang memiliki kemampuan untuk berpikir. Dari situ kemudian mereka melakukan interaksi dalam kesehariannya, termasuk interaksi dalam masalah politik. Dalam proses interaksi itulah mereka memahami makna dari simbol-simbol tertentu, sehingga merangsang mereka untuk menentukan pilihan sebelum kemudian melakukan tindakan.

Masyarakat Kabupaten Soppeng yang mana merupakan daerah bekas kerajaan, *mindset* mereka masih dipengaruhi oleh mitos-mitos para pendahulu mereka, termasuk dalam masalah politik. *Mindset* tersebut menjadi suatu hal yang turun temurun, karena setiap ada anak yang lahir, mereka akan dibentuk dengan pola pikir yang diwarisi oleh orang tuanya dari nenek-kakeknya. Demikian pula kakek-nenek mereka, pola pikir seperti itu diwarisi dari buyut mereka dan seterusnya. Hal seperti ini jelas akan mempengaruhi konsep diri mereka, sehingga dalam berinteraksi pun mereka membuat batasan-batasan.

Namun, akibat interaksi itu pula, pola pikir mereka lambat laun mengalami pergeseran, hal ini karena proses interaksi itu sendiri semakin hari semakin mengalami perubahan. Dengan demikian, interaksi sosial mengembangkan kemampuan berpikir mereka dengan cara-cara yang khas manusiawi, serta lebih mandiri.

Meski demikian, perubahan proses interaksi tidaklah serta merta merubah pola pikir masyarakat secara keseluruhan, utamanya masyarakat yang masih tinggal jauh dari perkotaan (baik dari Ibu Kota Provinsi, maupun dari Ibu Kota Kabupaten). Kondisi seperti inilah yang membuat para elit aristokrat disuatu

daerah seperti di Kabupaten Soppeng untuk kembali memunculkan tradisi dan simbol aristokrasi mereka, utamanya pasca lahir undang-undang otonomi daerah, yang memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpinnya melalui pemilukada.

Oleh karena itu, melalui teori interaksionisme simbolik ini, penulis akan mengkaji sejauh mana penguatan tradisi-tradisi dan simbol-simbol aristokrasi tersebut berkontribusi dalam dinamika politik lokal, tepatnya di Kabupaten Soppeng. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Charon, bahwa simbol merupakan alat berinteraksi yang tidak hanya memungkinkan seseorang melampaui waktu, ruang, dan bahkan dirinya sendiri, yaitu dengan konsep “mengambil peran orang lain”, namun juga memungkinkan seseorang menghindari diperbudak oleh lingkungan, bahkan mampu membuat seseorang menjadi aktif daripada pasif dengan mengarahkan perbuatannya sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sugiyono, bahwa metode kualitatif sering juga dinamakan sebagai metode baru, postpositivistik, artistik, dan *interpretative research*, serta naturalistik. Dinamakan metode baru, karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode postpositivistik, karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Dinamakan metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola). Disebut sebagai metode *interpretative*, karena data

hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Dan dinamakan sebagai metode naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).¹²

Secara praktis, metode penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan penafsiran/teoritis yang membentuk dan mempengaruhi riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial.¹³ Dalam metode penelitian ini, makna merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti, serta data yang merupakan nilai dibalik yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, generalisasi tidak ditekankan, tapi yang ditekankan adalah makna.¹⁴ Untuk lebih jelasnya, berikut penulis uraikan sistematika metode penelitian dalam tulisan ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diliput dari data lapangan (*field research*). Ditinjau dari sifat data, termasuk dalam penelitian kualitatif (*qualitative research*). Pada penelitian ini, peneliti berusaha menemukan secara langsung dan menginterpretasikan tradisi-tradisi dan simbol-simbol elit aristokrat Kabupaten Soppeng yang selama ini berusaha dimunculkan untuk dijadikan sebagai senjata dalam berpolitik.

2. Sumber Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-10, (Bandung: ALFABETA, 2010), 7-8.

¹³ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan*, Edisi ke-3, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 59.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 9.

Sumber data dan Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan suatu hal vital. Dimana seorang peneliti yang tidak mengetahui hal tersebut tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini sumber data dibagi kedalam dua bentuk. Sumber data primer dan skunder. Sumber data primer didapat dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu: Teknik pertama, wawancara secara mendalam (*in depth interview*), baik itu dari masyarakat biasa, tokoh masyarakat, aktivis, maupun dari para politisi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara, *Pertama*, mengadakan silaturahmi kepada responden, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan peneliti. *Kedua*, meminta kesediaan responden untuk mengemukakan beberapa hal yakni: riwayat hidup, tanggal kelahiran, keluarga, pendidikan, pengalaman politik, serta komentar terhadap pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan elit aristokrat Kabupaten Soppeng.

Teknik *kedua*, observasi. Teknik ini dilakukan guna melacak secara sistematis dan langsung gejala-gejala yang terkait dengan masalah penelitian, seperti masalah-masalah sosial, kultur, dan politis. Sanafiah Faisal, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono menyatakan, bahwa observasi itu terbagi tiga, yaitu: Observasi partisipasi (*participant observation*), observasi secara terang-terangan (*overt observation*), dan observasi secara samar-samar (*covert observation*).¹⁵ Kemudian data skunder akan diperoleh melalui studi dokumentasi, yaitu meneliti segala dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku, artikel,

¹⁵ *Ibid.*, 226.

koran, dan lain sebagainya yang dianggap dapat melengkapi secara komprehensif hasil penelitian ini.

3. Analisis dan Keabsahan Data

Analisis data melalui tahap pemerosesan, memilah data yang sama dan yang berbeda dari para responden, lalu menyuguhkannya. Adapun untuk menilai keabsahan data diminta dari tokoh masyarakat yang dianggap memiliki loyalitas, kompetensi dan integritas yang tinggi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi obojek penelitian penulis adalah salah satu Kabupaten bekas kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Soppeng. Kabupaten ini, berada di sebelah utara ibu kota provinsi, berkisar 180 km, dengan luas sekitar 1500 km. Elit aristokrat yang terdapat di Kabupaten tersebut penulis jadikan sebagai fokus penelitian dalam tulisan ini, disebabkan karena dua alasan, yaitu: yang *pertama*, sejauh pengamatan penulis, dari beberapa kajian elit aristokrat di Sulawesi Selatan yang penulis temukan, belum ada yang mengkaji secara khusus daerah ini, padahal Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah bekas kerajaan yang pernah memberi pengaruh cukup besar di kepulauan Sulawesi. Yang *kedua*, ada sebuah paradoks yang terjadi, dimana meski demokratisasi sudah mulai berjalan di daerah tersebut, dimana semua elit, baik yang berasal dari golongan aristokrat maupun non aristokrat bebas ikut bersaing di atas panggung kontestasi politik, namun sampai sekarang elit aristokrat masih tetap berkuasa.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam tulisan ini akan dibagi kedalam lima bab. Bab pertama, sebagaimana umumnya karya tulis tesis, akan dibahas mengenai latar belakang masalah, lalu dilanjutkan dengan perumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Kemudian pada bab kedua, akan dikaji mengenai proses politik yang selama ini terjadi di Kabupaten Soppeng, mulai sejak era pra kolonial, hingga era reformasi. Untuk mengkaji hal tersebut, penulis akan mengurai beberapa hal, yang mana merupakan salah faktor pendukung terbesar yang berkontribusi dalam dinamika politik yang terjadi di daerah tersebut, yaitu: asal-usul stratifikasi sosial masyarakat Kabupaten Soppeng, potret sistem pemerintahan yang pernah berlaku, konsep panggadereng, serta dua azas kehidupan bermasyarakatnya; *siri'* dan *tane'*. Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan terkait pelestarian tradisi dan simbol aristokrasi yang merupakan sebuah alat politik aristokrat untuk melanggengkan kekuasaan.

Selanjutnya, pada bab tiga akan dielaborasi mengenai pertarungan antara tradisi dan simbol aristokrasi dengan tradisi dan simbol non aristokrasi dalam kontestasi politik di Kabupaten Soppeng. Dalam bab ini akan diuraikan terkait munculnya tradisi dan simbol non aristokrasi, lalu kemudian diakhiri dengan penjelasan terkait pengaruh tradisi dan simbol terhadap perilaku politik masyarakat Soppeng.

Selanjutnya, pada bab ke empat akan dikaji terkait pola pelestarian tradisi dan simbol yang dilakukan oleh aristokrat Soppeng dalam rangka melakukan penguatan terhadap kekuasaan mereka.

Dan terakhir adalah bab lima, sekaligus penutup. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, lalu kemudian di akhiri dengan saran penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, proses politik yang terjadi di Soppeng pada awalnya disetir oleh kaum aristokrat, baik pada era pra kolonial, era kolonialisasi, maupun pasca kolonial. Hal ini karena, semua perilaku politik elit aristokrat Soppeng mendapat legitimasi dari mitos To Manurung (orang yang dipercayai turun dari langit/keturunan dewa), sehingga masyarakat setempat selalu merasa rela diatur oleh aturan yang dibuat oleh kaum aristokrat.

Perubahan proses politik terjadi di Soppeng setelah Kerajaan tersebut dilikuidasi oleh pemerintah Pusat menjadi Kabupaten, tepatnya pada tahun 1957. Namun karena jarak Kabupaten Soppeng terletak jauh dari Ibu kota Provinsi, sehingga kaum elit aristokrat setempat masih mampu memainkan perannya. Dominasi aristokrat mulai melemah saat jabatan Presiden dipegang oleh Rezim Orde Baru. Jabatan Kepala Daerah (Bupati) tidak lagi dipegang oleh elit aristokrat, melainkan oleh orang-orang yang mau menjadi robot pemerintah pusat yang notabene berasal dari golongan *tau sama* (non aristokrat).

Jabatan politik di Soppeng kembali dikuasai oleh elit aristokrat pasca tumbang rezim Orde Baru. Namun demikian, proses politik tidak bisa lagi

mereka setir sebagaimana pada era pra kolonial. Hal ini karena, masyarakat tidak lagi menjadi objek politik yang pasif, melainkan sebagai objek yang aktif.

Hanya saja, tidak dapat dipungkiri pula, bahwa sebagian besar masyarakat di Soppeng, masih memegang ideologi lama, sehingga kaum aristokrat berupaya melestarikan tradisi dan simbol aristokrasi mereka sebagai alat politik. diantara tradisi yang berusaha dilestarikan oleh kaum elit aristokrat Soppeng, yaitu: tradisi *mattoriolo*, tradisi menulis silsilah, tradisi *massure'*, dan tradisi pernikahan sesama aristokrat. Sedangkan simbol-simbol yang berusaha dilestarikan, yaitu: arsitektur rumah, pakaian; *baju bodo* dan *baju kameja*, serta *songko' pamiring*.

Kedua, dalam menyikapi pertarungan tradisi-tradisi dan simbol-simbol aristokrasi versus tradisi-tradisi dan simbol-simbol non-aristokrasi di atas panggung perpolitikan Kabupaten Soppeng, masyarakat Soppeng terbagi dua kelompok, yaitu: masyarakat yang tradisional dan masyarakat yang rasionalis. Masyarakat yang tradisional, merupakan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, sehingga bagi masyarakat kelompok ini, penampakan tradisi-tradisi dan simbol-simbol aristokrasi di atas panggung perpolitikan, akan berkontribusi menentukan sikap politik mereka.

Adapun masyarakat yang rasionalis, merupakan kelompok masyarakat yang lahir karena dua hal. *Pertama*, melalui pendidikan, dalam hal ini minimal strata satu. Yang *kedua* adalah masyarakat yang memiliki kebiasaan melakukan diskusi-diskusi non formal. Kelompok masyarakat terakhir ini lebih cenderung memaknai segala simbol, baik yang verbal maupun non verbal, yang berhubungan

dengan aristokrasi sebagai warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dihargai, tanpa harus mempengaruhi perilaku politik seseorang.

Ketiga, dari sekian banyak tradisi dan simbol yang digunakan oleh aristokrat Soppeng sebagai alat politik, ada beberapa tradisi yang berlaku hanya dilingkungan aristokrat dan adapula yang berlaku dilingkungan masyarakat, sehingga hal tersebut berimplikasi pada pola pelestarian tradisi dan simbol aristokrasi. Pola pelestarian tradisi dan simbol yang hanya berlaku dilingkungan aristokrat dilakukan dengan cara konsistensi menjaga tradisi dan simbol tersebut. Sedangkan pola pelestarian tradisi dan simbol yang berlaku dilingkungan masyarakat dilakukan dengan cara formal dan informal, seperti melalui politik birokratik, festival budaya, seminar-seminar budaya dan sakralisasi tradisi.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu; *pertama*, penelitian ini tentunya masih jauh dari sempurna. Hal ini karena, disatu sisi beberapa responden sulit untuk ditemui, dan sisi lain, beberapa tokoh masyarakat enggan untuk diwawancarai. Sehingga perlu kiranya dilakukan penelitian lanjutan dengan data yang lebih komprehensif.

Kedua, mengingat masih sangat minimnya kajian tentang politik aristokrasi, khususnya terkait aristokrat Kabupaten Soppeng, sehingga dengan kehadiran karya ini, semoga bisa menggugah hati para peneliti berikutnya untuk mengkaji lebih jauh, sehingga lahir karya-karya tentang politik aristokrasi yang lebih elaboratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, *Capita Selecta: Sejarah Sulawesi Selatan*, Makassar: Hasanuddin University Press, 1999.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaaniyyah*, Kairo: daar al-hadits, t.th., hlm. 19-20
- Amiruddin., dan Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Andaya, Leonard Y., *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke17*. terj. Nurhady Sirimorok, Makassar: Innawa, 2004.
- Arfah, Muhammad dkk. *Biografi Pahlawan Lanto Daeng Pasewang Sebagai Seorang Nasionalis dan Patriotik*, Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Buku panduan peringatan hari jadi kab. Soppeng ke-755 tahun 2016.
- Creswell, John W., *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan*, Edisi ke-3, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Farid, Andi Zainal Abidin, “Siri, Pesse, dan Were’ Pandangan Hidup Orang Bugis”, dalam *Siri’ dan Pesse harga diri orang bugis, makassar, mandar, toraja*, ed. Moh. Yahya Mustafa dkk. ttp: t.p, 2006.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Aswab Mahasin (terj.) cetakan Ke-3 Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- Hall, K.R., ‘State and statecraft in early Srivijaya’, ed. K.R. Hall and J.K. Whitmore, *Explorations in early Southeast Asian history; The origins of Southeast Asian statecraft*, Ann Arbor: Centre for South and Southeast Asian Studies. 1976.
- Hamid, Abdullah, *Manusia Bugis Makassar: Suatu tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis-Makassar*, Jakarta: Inti Dayu: 1985.
- Hamid, Abu, *Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan*, Makassar: Antropologi UNHAS, 1997.
- Hassel J. “Islam dan Adat di Tanah Bugis: antara Konfrontasi dan Konformitas”. Irwan Abdullah, Wening Udasmoro dan Hassel J. (ed.). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer*, cet. Pertama, Yogyakarta: TICI Publications, 2009.

- Iqbal, Imam, "Filasafat Islam di Indonesia". Makalah dipresentasikan pada Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Tahun ke-35 tanggal 9 September 2016.
- Ismanto, Ignatius, "Dinamika Politik Lokal di Era Otonomi Daerah", dalam *Proceeding Nasional Otonomi Daerah 2011*, LAB-ANE FISIP Untirta.
- Jaya MS, Putra, A. *Abd. Muis La Tenridolong: Sang Patriot Tanpa Pusara*, cet. Pertama, Makassar: Yayasan La Waniaga, 2006.
- Mardanas, Izarwisma., dkk, *Arsitektur Tradisional Daerah Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang; Proyek inventarisasi dan Dokumentasi kebudayaan daerah departemen pendidikan dan kebudayaan, 1985.
- Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Muluk, M.R. Khairul, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Malang: Bayu Publising, 2007.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Ke-3 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nonci, *Konsep-Konsep Budaya*, cet. Pertama, Makassar: CV. Aksara, 2005.
- _____, *Lontara Soppeng*, Makassar: CV. Aksara, 2003.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken (ed.), *Politik Lokal di Indonesia*, terj. Bernard Hidayat, Jakarta: KITLV, 2007.
- Nur, M. Rafiuddin, *Mattoriolo ri Goarie: Tradisi yang tergesur*, ttp.: t.p., 2004.
- _____, *Lontara Pangnguriseng: Appongenna Anakarung'e ri Sulawesi ri Attang (Silsilahn, Asal-Usul Keturunan Aristokrat di Sulawesi Selatan)*, ttp.: t.p., 2001.
- Pelras, Christian, *Manusia Bugis*, (terj.) Abdul Rahman dkk, cet. Pertama, Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta-Paris, 2006.
- Putra, Heddi Shri Ahimsa, *Minawang Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988.
- Rahim, A. Rahman, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Cetakan ke-3, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1992.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Edisi kedelapan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sugiprawaty, “Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan TH 2007-2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-10, Bandung: ALFABETA, 2010.

Sumange, Hary, *Sejarah Arajanna Soppeng*, Jilid II, Watansoppeng: Yayasan Bina Budaya Soppeng, 2007.

Syarif Hidayat. *Too Much Too Soon*, Jakarta: Rajawali Pres, 2005.

Tangke, A. Wanua., dan Anwar Nasyaruddin, *Orang Soppeng Orang Beradab*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2006.

Urniatmo, Gatut dkk, *Khazanah Budaya Lokal: Sebuah pengantar Untuk Memahami Kebudayaan Daerah di Nusantara*, cet. Pertama, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.

JURNAL

Haryanto, “Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 13, Nomor 2, November 2009.

Fahmid, Imam Mujahidin dkk., “Pasang Surut Polarisasi Elit di Dalam Etnis Bugis dan Makassar”, dalam *Jurnal Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Agustus 2012.

Van, Corrie Van Der, “Kepemimpinan Melampaui Feodalisme dan Primordialisme.”, dalam *Jurnal STT Intim Makassar*, Edisi No. 7, 2004.

Yusrialis, “Budaya Birokrasi Pemerintahan (Keprihatinan dan Harapan).” Dalam *jurnal sosial budaya*, Vol. 9 No. ! Januari-Juli 2012.

WEB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia. diakses 25 September 2016.

<https://m.tempo.co/read/news/2010/01/04/058219159/mahasiswa-tuntut-bupati-soppeng-ditangkap-dan-diadili>. Diakses 20 September 2016.

<http://bagopspolressoppeng.blogspot.co.id/2012/12/peringatan-hari-anti-korupsi-di.html?m=1>. Diakses 13 September 2016

<http://m.gosulsel.com/news/23/04/2016/warga-kampung-bakke-soppeng-temukan-ratu-padi-di-sawah/>. Diakses 16 September 2016.

Makassar.tribunnews.com/2015/12/16/ini-perolehan-suara-akhir-lhd-azas-dan-akar-super-di-pilkada-soppeng. 23 pebruari 2016.

Makassar.tribunnews.com/2015/12/16/ini-perolehan-suara-akhir-lhd-azas-dan-akar-super-di-pilkada-soppeng?page=2. Diakses 23 pebruari 2016.

Makassar.tribunnews.com/2015/12/16/ini-perolehan-suara-akhir-lhd-azas-dan-akar-super-di-pilkada-soppeng. Diakses 23 pebruari 2016.

Musyawal, “Pemaknaan Busana Bugis-Makassar”, dalam <http://perangmakassar.blogspot.co.id/20011/04/pemaknaan-busana-bugis-makassar-.html?m=1>. Diakses 12 September 2016.

Siregar, Ale “interaksionisme simbolik menurut John Dewey”. www.issiregar.wordpress.com/2016/03/21/interaksionisme-simbolik-menurut-John-Dewey-2/. Diakses 18 September 2016.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Perbatasan Kabupaten Soppeng dengan Kabupaten Barru



Gambar 2. Kantor Bupati Soppeng



Gambar 3. Kantor DPRD Soppeng



Gambar 4. Beberapa Anak Muda Ngopi Bareng di Salah Satu Kafe di Ibu Kota Soppeng



Gambar 5. Saoraja dengan Bubungan 7 Tingkat, yang Kini dijadikan Museum Arajang (Benda Pusaka Kerajaan), dan sekarang bernama Bola Ridie



Gambar 6. Bola Arung dengan Bubungan 3 Tingkat



Gambar 7. Penulis (kanan) Bersama dengan Pak Sarika (kiri)



Gambar 8. Penulis (kanan) Bersama Kepala Desa Mariorilau (kiri)



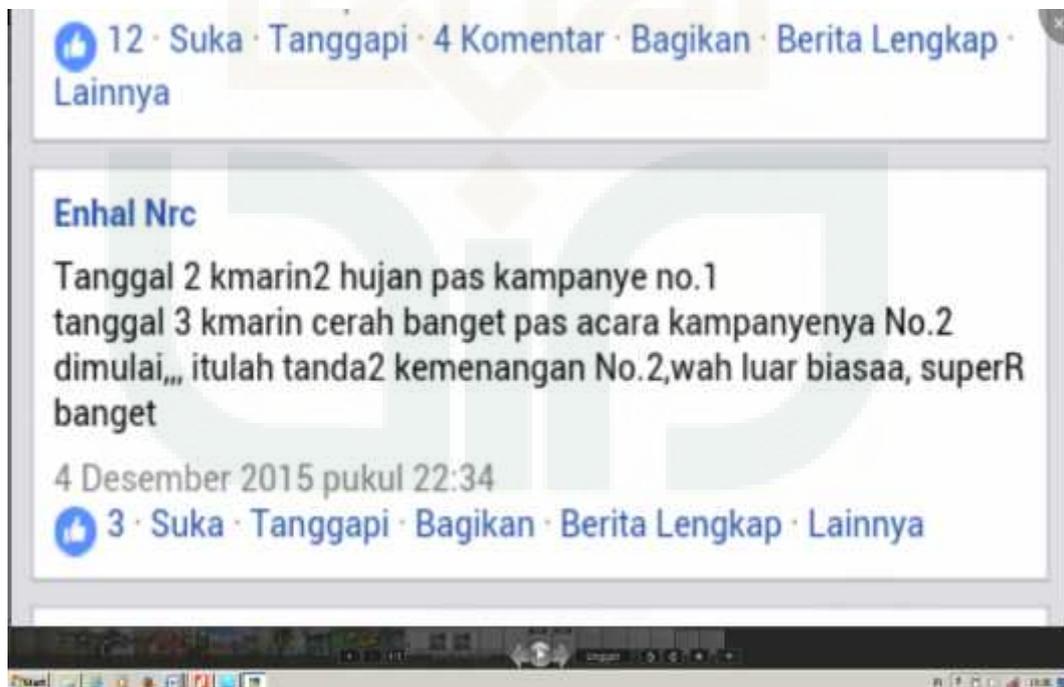
Gambar 9. *Baju Bodo* dan *Jas Tutup Modern*



Gambar 10. *Songko' Pamiring* dengan Hiasan Emas



Gambar 11. *Songko' Pamiring* dengan hiasan perak



Gambar 12

[Beranda](#) [Profil](#) [Pesan](#) [Pemberitahuan](#) [Obrolan\(59\)](#) [Teman](#)
[Halaman\(2\)](#) [Menu](#)

Herlinawati Azizah > PILKADA SOPPENG 2015

Sosok pemimpin yang merakyat memang sangat dibutuhkan. Sehingga sudah seharusnya jika pemimpin di negeri ini dapat bersikap lebih merakyat.

Dalam memilih pemimpin jangan asal pilih.
 Kalau mau baik pilih pemimpin baik.
 Kalau ingin bersih pilihlah pemimpin bersih.

Dalam memilih calon pemimpin jangan memilih calon yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan, seperti kampanye hitam (black campaign) dan money politics. Sebab, pemimpin yang dipilih karena bayaran dan menggunakan segala cara untuk menang dipastikan akan korupsi. Karena itu, masyarakat harus benar-benar membandingkan TRACK RECORD sang kandidat.

Pilihlah PEMIMPIN yang terbaik. pemimpin yang menjadi NOMOR 1 di HATI rakyatnya. Memang pemimpin tidak ada yang sempurna, tapi MASYARAKAT perlu membandingkan mana yang lebih baik untuk dipilih menjadi pemimpin ke depan

Sebagai warga yang baik anda harus menggunakan hak pilih dengan bijak pada pilkada 9 Desember mendatang.

Pilkada merupakan momen penting untuk menentukan CAI ON PEMIMPIN no SATU untuk Soppeng lima tahun ke depan
 #Mari_jadi_pemilih_cerdas

Gambar 13

Gambar 14. *Bola Tau Sama* (Rumah Orang Biasa)



SRN CO0001984

**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU**

Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 317/IP/KPT/VIII/2016

DASAR 1. Surat Permohonan **MUHAEMIN** Tanggal **16-08-2016**
2. Rekomendasi dari **BAPPEDA**
Nomor **317/IP/REK-T.TEKNIS/BAPPEDA/VIII/2016** Tanggal **16-08-2016**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MUHAEMIN**
UNIVERSITAS/ : **UIN SUNAN KALIJAGA**
LEMBAGA
Jurusan : **STUDI POLITIK DAN PEMERINTAHAN ISLAM**
ALAMAT : **ANCE, T. RILAU KAB. BARRU**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Soppeng dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : **PENGUATAN TRADISI DAN SIMBOL ELIT ARISTOKRAT DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL DI KABUPATEN SOPPENG**

LOKASI PENELITIAN : **KABUPATEN SOPPENG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **01 Agustus 2016 s.d 30 Agustus 2016**

- Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 16-08-2016

KEPALA KANTOR,



Drs. A. MAKKARAKA, M. Si

Pangkat : **PEMBINA TK. I**

NIP : **19690615 199703 1 010**

Biaya : Rp. 0.00



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Salotungo No. 2 Telp (0484) 23743 Watansoppeng

SURAT KETERANGAN

Nomor : 561/KPT/VIII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. A. MAKKARAKA, M.Si
Nip : 19690615 199703 1 010
Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU

Dengan ini menerangkan :

Nama : **MUHAEMIN**
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga
Jurusan : Studi Politik dan Pemerintahan Islam
Alamat : Ance, T. Rilau Kab. Barru

Adalah benar telah menyelesaikan penelitian di Kabupaten Soppeng dengan judul penelitian :
“Penguatan Tradisi dan Simbol Elit Aristokrat Dalam Dinamika Politik Lokal Di Kabupaten Soppeng”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 30 Agustus 2016

KEPALA
KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN SOPPENG


Drs. A. MAKKARAKA, M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
Nip : 19690615 199703 1 010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhaemin, S.Sy.
 Tempat/Tgl. Lahir : Ance, 06 Februari 1990
 Alamat Rumah : Ance, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, Sulawesi Selatan
 Nama Ayah : H. Mas'ud Huke
 Nama Ibu : Hj. Nadira
 No. HP : 0823-3994-9991
 Email : muhaemin83@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. 1995-2001 : Madrasah Ibtidaiyyah Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Ance
- b. 2001-2003 : Madrasah Tsanawiyah Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Pekkae
- c. 2005-2008 : Madrasah Aliyah Pon-Pes Darud Da'wah wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD), Mangkoso, Barru, Sulawesi Selatan
- d. 2008-2013 : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darud Da'wah wal Irsyad (DDI), Mangkoso, Barru, Sulawesi Selatan
- e. 2014-2016 : Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Pendidikan Non-Formal

- a. 2004-2005 : Madrasah I'dadiyah Pon-Pes Darud Da'wah wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD), Mangkoso, Barru, Sulawesi Selatan
- b. 2013 : Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan